

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya

#### 1. **Komunikasi**

- a) Apakah kebijakan tentang persyaratan penghuni Rusunawa yang tercantum dalam Perwali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 telah disampaikan dengan pihak pelaksana teknis lapangan?
- b) Apakah penghuni Rusunawa mengetahui adanya Perwali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 tersebut? Apakah sudah dilakukan sosialisasi terhadap warga yang berstatus non MBR?
- c) Apakah masih terdapat masyarakat yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam Perwali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022?

#### 2. **Sumber Daya**

- a) Bagaimana dukungan staff dalam pelaksanaan kebijakan agar sesuai dengan Perwali tersebut?
- b) Bagaimana peran staff dalam proses seleksi agar dapat sesuai dengan kebijakan yang ada?
- c) Apa saja yang telah dilakukan DPRKPP dalam menjaga fasilitas di Rusunawa?

#### 3. **Disposisi**

- a) Apakah pihak terkait telah melaksanakan sistem pengelolaan dan seleksi sesuai dengan kebijakan yang ada?
- b) Apakah setiap tugas staff terkait memiliki aturan baku yang telah ditetapkan?
- c) Jika masih terdapat penghuni Rusunawa yang berstatus non MBR, maka langkah apa yang dilakukan dinas terkait untuk menangani permasalahan tersebut?

#### 4. **Struktur Birokrasi**

- a) Bagaimana sistem pengawasan terkait kebijakan Perwali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022?

- b) Bagaimana sistem pemantauan dan evaluasi yang dilakukan untuk mengurangi adanya masyarakat yang berstatus non MBR di Rusunawa?

## Pedoman wawancara untuk penghuni Rusunawa Keputih Kota Surabaya

### **1. Komunikasi**

- a) Apakah Bapak/ Ibu mengetahui persyaratan utama untuk bisa menempati Rusunawa?
- b) Apakah masih terdapat masyarakat non MBR yang tinggal di Rusunawa ini?
- c) Apakah Dinas terkait melakukan sosialisasi terkait kebijakan yang ada pada Perwali Nomor 83 Tahun 2022?

### **2. Sumber Daya**

- a) Apakah fasilitas yang diberikan pemerintah sudah cukup baik dan memadai?
- b) Apakah staff dari Dinas terkait melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penghuni Rusunawa yang berstatus non MBR?

### **3. Disposisi**

- a) Apakah menurut Bapak/Ibu, staff terkait telah melaksanakan tugasnya dengan baik? Mulai dari proses pengurusan persyaratan hingga tanda tangan perjanjian sewa?

### **4. Struktur Birokrasi**

- a) Bagaimana tata cara penyampaian apabila terdapat permasalahan ataupun keluhan terkait adanya penghuni Rusunawa yang masih berstatus non MBR?
- b) Apakah ada sanksi yang diberikan apabila terdapat penghuni yang berstatus non MBR?

## Lampiran 2. Hasil Wawancara

### a) Keterangan Informan Pihak UPTD Rusunawa Kota Surabaya

1. Nama : Adinda Prihardini, S.T.  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Kepala UPTD Rusunawa  
 Lokasi Wawancara : DPRKPP Kota Surabaya  
 Jl. Taman Surya No. 1, Ketabang, Kec.  
 Genteng, Kota Surabaya  
 Tanggal Wawancara : 28 Maret 2023
  
2. Nama : Taufan Fathurroji Anwar  
 Jenis Kelamin : Laki - Laki  
 Pekerjaan : Pelaksana Teknis Lapangan UPTD  
 Rusunawa / Pengelola Rusunawa  
 Keputih  
 Lokasi Wawancara : Rusunawa Keputih  
 Jl. Keputih Tegal Timur, Kec. Sukolilo,  
 Kota Surabaya  
 Tanggal Wawancara : 3 April 2023

Pelaksana Wawancara	Materi Wawancara
Peneliti	Apakah kebijakan tentang persyaratan penghuni Rusunawa yang tercantum dalam Perwali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 telah disampaikan dengan pihak pelaksana teknis lapangan?
Ibu Dinda	setiap rusun itu ada pegawai lapangan dari dinas, nah mereka juga sudah diberitahukan sejak perwali ini ditetapkan
Bapak Taufan	sudah mbak, kami sudah diberitahu tentang perwali tersebut dan sudah kami sampaikan pada ketua paguyuban terkait
Peneliti	Apakah penghuni Rusunawa mengetahui adanya Perwali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 tersebut? Apakah sudah dilakukan sosialisasi terhadap warga yang berstatus non MBR?

Ibu Dinda	iya, sudah disosialisasikan dengan penghuni Rusunawa melalui pihak pelaksana teknis lapangan terkait. Mereka membantu proses sosialisasinya
Bapak Taufan	disini kan nggak ada ketua RT adanya ketua paguyuban. Jadi sosialisasinya melalui ketua paguyuban yang disampaikan ke warga. Melalui surat edaran dan grup whatsapp juga, jadi semua sudah disampaikan ke warga
Peneliti	Apakah masih terdapat masyarakat yang tidak sesuai dengan persyaratan dalam Perwali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022?
Ibu Dinda	iya masih ada beberapa warga yang berstatus Non MBR. Nah karena Perwali ini kan baru ditetapkan pada 26 Agustus 2022 lalu, sedangkan Rusunawa di Kota Surabaya ini ada yang sudah dibangun sejak tahun 80-an dan 90'an. Dulu itu persyaratan masuk Rusun tidak seperti sekarang ini. Jadi kalau dibilang ada warga yang non MBR itu kemungkinan benar
Bapak Taufan	ya bisa dikatakan masih ada, karena awalnya yang pindah ke rusun ini dulunya banyak dari penggusuran jalan. Warga yang dari penggusuran ini kan gak semuanya MBR juga. Sedangkan perwali ini baru ditetapkan tahun lalu jadi persentasenya antara penghuni yang MBR dan Non MBR itu hampir enam puluh persen banding empat puluh persen.
Peneliti	Bagaimana dukungan staff dalam pelaksanaan kebijakan agar sesuai dengan Perwali tersebut?
Ibu Dinda	staff terkait ikut andil dalam setiap prosesnya. Staff bagian seleksi melakukan seleksi sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam perwali tersebut. staff bagian survey melakukan survey di lapangan. staff dari dinas juga menjadi pengelola dan menjadi penghubung antara penghuni rusun dengan dinas. Kalau ada apa-apa ya melalui pengelola rusun itu
Peneliti	Apa saja yang telah dilakukan DPRKPP dalam menjaga fasilitas di Rusunawa?
Ibu Dinda	yang memantau fasilitas di rusunawa ini dari dinas sendiri. Di setiap rusunawa juga ada petugas yang

	memantau jika ada kebocoran atau kerusakan fasilitas. Petugas lapangan juga melakukan pelaporan setiap hari terkait keadaan di lapangan
Bapak Taufan	biasanya warga itu lapor melalui saya terus nanti kita foto-foto mana yang rusak, seberapa parah. Kemudian kami laporkan. Nanti ada timnya sendiri bagian perbaikan. Timnya ini dari dinas juga” “kalau untuk keamanan kita biasanya sidak keliling tiap 1 jam sekali kalau malam hari. Untuk pengecekan pengisian tandon itu juga kita pantau karena masih pakai manual. Dulu pernah pakai yang otomatis itu malah nggak bisa mbak.
Peneliti	Apakah pihak terkait telah melaksanakan sistem pengelolaan dan seleksi sesuai dengan kebijakan yang ada?
Ibu Dinda	kalo di kita itukan mulai dari proses seleksi administrasi ya mbak, nah kita seleksi itu apa sudah masuk dalam data MBR daerah atau nggak. Tapi kalau untuk mengetahui gimana pengolahan data MBR itu bukan wewenang kami, jadi kita hanya melakukan seleksi dari data yang sudah ada tadi. Sekarang istilah MBR ini berubah menjadi GAMIS (Keluarga Miskin) Jadi kami hanya diberi akses untuk bisa melakukan pengecekan apakah NIK tersebut masuk kedalam GaMis atau tidak.
Peneliti	Apakah setiap tugas staff terkait memiliki aturan baku yang telah ditetapkan?
Bapak Taufan	terkait aturannya itu kita ada MOU bahwasannya untuk menjaga ketertiban rusun. MoU itu kayak surat tugas gitu mbak. Diperjanjian kerjanya juga di tulis.
Peneliti	Jika masih terdapat penghuni Rusunawa yang berstatus non MBR, maka langkah apa yang dilakukan dinas terkait untuk menangani permasalahan tersebut?
Ibu Dinda	melakukan sosialisasi tentang adanya perwali tersebut. cari tempat tinggal itu kan nggak mudah, jadi kita tunggu pelan – pelan sampai dapat rumah diluar rusunawa. Kemarin ada PNS di salah satu rusunawa juga, setelah mendapat sosialisasi tentang pemberlakuan perwali ini, orang tersebut juga memberikan respon

	baik dan meminta waktu untuk mencari kontrakan. Karena kan semuanya harus dilakukan secara bertahap.
Bapak Taufan	ya itu tadi mbak kita beritahukan dan diberikan edaran. Tapi untuk beberapa bulan ini masih belum ada yang pindah karena ya mereka sudah nyaman dan walaupun keluar dari sini juga mereka ndak punya tempat tinggal. Kalau yang PNS itu sudah pindah dari lama
Peneliti	Bagaimana sistem pengawasan terkait kebijakan Perwali Kota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022?
Ibu Dinda	untuk pengawasannya itu ada 2 sistem, yang pertama dari pengawasan pendataan kita sendiri, dan yang kedua ini dari laporan pengaduan. Laporan pengaduan ini bisa macem – macem bisa melalui ‘wargaku’ atau bisa melalui petugas yang ada di lapangan nanti bisa disampaikan oleh petugas lapangan ke dinas
Bapak Taufan	kalau ada ketidakseuaian atau ada warga yang memindahtangankan unit rusun itu warga bisa lapor atau memberitahuka ke kami nanti kami akan mengambil kunci unitnya. Tapi belum ada warga yang mengalihkan pemakaian rusun disini
Peneliti	Bagaimana sistem pemantauan dan evaluasi yang dilakukan untuk mengurangi adanya masyarakat yang berstatus non MBR di Rusunawa?
Ibu Dinda	jadi kita lakukan pendataan dan evaluasi terhadap kesesuaian persyaratan. Jika ada ketidaksesuaian dari persyaratan dalam kebijakan itu diberi kesempatan dengan perjanjian hingga kurang lebih satu tahun sejak perwali ditetapkan. Untuk tindakan selanjutnya melihat apakah terjadi perubahan kebijakan lagi atau tidaknya.
Bapak Taufan	kita juga bingung karena warga yang non MBR itu juga banyak. Dari dinas juga masih mencari jalan tengah supaya tidak merugikan warga, karena kan mereka juga nggak punya tempat tinggal diluar sana. Makanya itu dinas masih merapatkan dan warga diberikan waktu maksimal satu tahun setelah perwali ditetapkan

**b) Keterangan Informan Penghuni Rusunawa**

1. Nama : Matari  
 Jenis Kelamin : Laki - Laki  
 Pekerjaan : Penghuni Rusunawa Keputih  
 Lokasi Wawancara : Rusunawa Keputih  
 Jl. Keputih Tegal Timur, Kec. Sukolilo,  
 Kota Surabaya  
 Tanggal Wawancara : 9 April 2023
  
2. Nama : Lusiana  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Penghuni Rusunawa Keputih  
 Lokasi Wawancara : Rusunawa Keputih  
 Jl. Keputih Tegal Timur, Kec. Sukolilo,  
 Kota Surabaya  
 Tanggal Wawancara : 9 April 2023
  
3. Nama : Mudrikah  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Penghuni Rusunawa Keputih  
 Lokasi Wawancara : Rusunawa Keputih  
 Jl. Keputih Tegal Timur, Kec. Sukolilo,  
 Kota Surabaya  
 Tanggal Wawancara : 9 April 2023

<b>Pelaksana Wawancara</b>	<b>Materi Wawancara</b>
Peneliti	Apakah Bapak/ Ibu mengetahui persyaratan utama untuk bisa menempati Rusunawa?
Bapak Matari	iya sudah, sebelum pindah itu dikasih tau dulu sama petugasnya
Ibu Mudrikah	saya kan pindahan dari gusuran. Nah kemarin sebelum menempati itu ternyata harus MBR. Akhirnya ngurus MBR dulu. Terus kapan hari MBR ku tak tanyakan itu ternyata kehapus mbak. Padahal gaji suami saya itu cuma satu juta sebulan. Sedangkan yang bisa tinggal



	disini itu harus MBR kan. Terus katanya masih di cek gitu
Ibu Lusiana	sudah dikasih tau mbak, tapi dulu saya pindah kesini karena kena gusuran mbak
Peneliti	Apakah Dinas terkait melakukan sosialisasi terkait kebijakan yang ada pada Perwali Nomor 83 Tahun 2022?
Bapak Matari	iyaa dulu itu pernah ada sosialisasi tapi sudah lama, lewat WA grup juga sudah disampaikan. Tapi kalau yang baru-baru saya kurang tau mbak soalnya kan kerja jarang dirumah
Ibu Lusiana	seingat saya itu ada Cuma edaran yang isinya soal pekerja pemkot nggak boleh tinggal disini lagi. Jangka waktu suratnya itu sampe agustus besok. Nanti kalau bulan agustus itu ada perubahan lagi juga kita nggak tau
Peneliti	Apakah fasilitas yang diberikan pemerintah sudah cukup baik dan memadai?
Ibu Mudrikah	sudah cukup sih mbak, responnya kalo ada keluhan juga baik
Ibu Lusiana	oh fasilitas disini sudah bagus mbak, semuanya lengkap ada buat belajar komputer juga dibawah itu
Peneliti	Apakah staff dari Dinas terkait melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penghuni Rusunawa yang berstatus non MBR?
Bapak Matari	iya ada mbak namanya sidak. Tapi lebih ke pemantauan kebersihan, terus kalau ada warga yang bukan pemilik asli, bukan warga yang berhak menempati atau warga yang tidak dikenal itu juga dipantau.
Ibu Lusiana	selalu dipantau setiap satu bulan sekali. Kalau ada yang nggak sesuai SK ya disuruh pindah. Ada di unit berapa itu kayak di kontrakkan ke orang lain. Pas di cek ternyata bener nggak sesuai SK ya disuruh pindah sama petugas mbak
Peneliti	Apakah menurut Bapak/Ibu, staff terkait telah melaksanakan tugasnya dengan baik? Mulai dari proses pengurusan persyaratan hingga tanda tangan perjanjian sewa?

Ibu Mudrikah	menurut saya sudah mbak karena tiap petugas kan ada tugasnya sendiri-sendiri
Ibu Lusiana	iya melaksanakan sesuai dengan pekerjaannya. Mereka juga selalu memataui tiap bulan mbak
Peneliti	Bagaimana tata cara penyampaian apabila terdapat permasalahan ataupun keluhan terkait adanya penghuni Rusunawa yang masih berstatus non MBR?
Bapak Matari	kalau ada ya bisa langsung lapor ke pengelola, nanti yang menindaklanjuti pengelolany
Ibu Mudrikah	langsung lapor ke pengelola aja mbak. Kemarin ada PNS itu langsung disuruh pindah juga mbak

### Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara dengan pihak terkait



Wawancara dengan Ibu Dinda  
(Kepala UPTD Rusunawa)



Wawancara dengan Bapak Taufan  
(Staff Pelaksana Teknis Lapangan UPTD  
Rusunawa / Pengelola Rusunawa Keputih)



Wawancara dengan Bapak Matari  
(Penghuni Rusunawa)



Wawancara dengan Ibu Lusiana  
(Penghuni Rusunawa)



Wawancara dengan Ibu Mudrikah  
(Penghuni Rusunawa)

## Lampiran 4. Surat Ijin Penelitian dari Universitas



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi : Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm. Publik, Doktor Ilmu Adm.  
 Gedung: F 101. Jl. Semolowaru 45 Surabaya ( 60118 )  
 Telp. 031 5925982, 5931800 psw. 159 e-mail : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 17 Maret 2023

Nomor : 1014/K/FISIP/III/2023  
 Lampiran : 1 (Satu) Berkas Proposal  
 Perihal : **Permohonan Ijin Observasi**

Kepada Yth. : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surabaya  
 Jl. Tunjungan No. 1-3, Surabaya

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Yunira Nur Hidayati (1111900063)	Deles 3/9-A, Surabaya	81391889277

Guna melakukan pengambilan data di :

**"Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya"**

Dengan judul Skripsi: **"Implementasi Kebijakan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Sebagai Upaya Memberikan Hunian Layak Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Surabaya"**

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Dekan  
  
 Dr. Dra. Ayu Maduwinarti, MP  
 NIP. 20120.87.0103

Tembusan :

## Lampiran 5. Surat Ijin Penelitian di DPRKPP



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

Nomor	: 500.16.7.4 / 1158 / S / RPM / 436.7.15 / 2023	Surabaya, 20 Maret 2023 Kepada
Lampiran	: -	Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanian di -
Hal	: Rekomendasi Izin Penelitian	Surabaya

### REKOMENDASI PENELITIAN

Dasar :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Pelayanan Non Perizinan
- Peraturan Walikota Surabaya No 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Teknis Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya Nomor 000.9.2/4593/436.8.6/2023 Tanggal 17 Maret 2023
- Persetujuan Teknis Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya Nomor 1014/K/FISIP/III/2023 Tanggal 17 Maret 2023 Perihal Permohonan Ijin Observasi.

Memperhatikan :

Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya Nomor 1014/K/FISIP/III/2023 Tanggal 17 Maret 2023 Perihal Permohonan Ijin Observasi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya memberikan Rekomendasi kepada :

a. Nama : YUNIRA NUR HIDAYATI  
b. Alamat : DELES 3/9 - A  
c. Pekerjaan/Jabatan : MAHASISWA  
d. Instansi/Organisasi : UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA  
e. Kewarganegaraan : INDONESIA

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

a. Judul / Tema : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN HUNIAN LAYAK BAGI MASYARAKAT BERPENDAHILAN RENDAH (MBR) DI KOTA SURABAYA  
b. Tujuan : Penelitian  
c. Bidang Penelitian : RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA  
d. Penanggung jawab : YUNIRA NUR HIDAYATI  
e. Anggota Peserta : -  
f. Waktu : 27 Maret 2023 s.d. 05 Mei 2023  
g. Lokasi : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanian

Dengan persyaratan :

- Dalam masa pandemi Covid-19, Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020;
- Untuk kegiatan tatap muka yang berpotensi menimbulkan kerumunan wajib mengajukan permohonan assessment kegiatan yang ditujukan kepada Ketua Satgas Covid-19 Tingkat Kecamatan Wilayah setempat;
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua) sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan oleh Pemerintah;
- Peserta Penelitian/survei/kegiatan wajib dalam keadaan sehat saat pelaksanaan kegiatan penelitian;
- Peserta Penelitian/survei/kegiatan wajib mentaati persyaratan/peraturan yang berlaku di Lokasi/Tempat dilakukan Penelitian serta tidak membebani kepada OPD, Camat, Lurah dalam pengambilan data primer dan sekunder;
- Pelaksanaan Penelitian/survei/kegiatan tidak boleh menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu keutuhan NKRI;
- Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.



a.n WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu




DEWI SOERİYAWATI, ST. MT  
Pembina Tingkat I  
NIP.197405132001122001

Tembusan :

Yth. 1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya.  
2. Saudara yang bersangkutan.

## Lampiran 6. Kartu Bimbingan










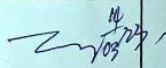

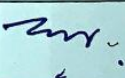


**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi  
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi  
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)  
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

---

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Yunira Nur Hidayati  
 NBI : 1111900063  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Dosen Pembimbing I : Dida Rahmadanik, S.AP., M.AP  
 Dosen Pembimbing II : Rachmawati Novaria, Dr., Dra., MM.

Judul Skripsi : <sup>Implementasi</sup> Evaluasi Program Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) Sebagai Upaya Memberikan Hunian Layak Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Surabaya

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
	13/23 f.000	Perbaiki judulnya = Sederhana		
	20/2023 2	Perbaiki LBM.		
	22/08/2023	Proposal Ace		
	9/2023 b	ACC Bab 2 & Bab 3 Lanjut Pedoman wawancara.		
	15/2023 3	ACC Turun Lapangan		
	3/2023 15	Revisi Bab 4		
	15/2023 15	ACC Bab 4 Revisi Bab 5		





**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi  
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi  
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)  
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

No.	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
	23/04/2023	Revisi u/ bab V		
	25/05/2023	Daftar ujian		
	30/05/2023	Tambahan suber & perbaikan u/ laporan		

Catatan:

1. Kartu Bimbingan dibawa saat bimbingan
2. Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing

Bimbingan dinyatakan telah selesai

Tanggal : 30-05-2023

Dosen Pembimbing I,

(Dida Rahmadanik, M.A.P.)

Dosen Pembimbing II,

(.....)

## Lampiran 7. Bukti Uji Turnitin



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
LABORATORIUM OTONOMI DAERAH  
Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

---

### SURAT KETERANGAN

Nomor: 211/K/LOD/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya

Nama : Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP  
NPP : 20110170735

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Yunira Nur Hidayati  
NBI : 1111900063

Berdasarkan hasil uji turnitin untuk Bab 1,4,5 skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%. Surat Keterangan ini di berikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran ujian skripsi".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 Mei 2023  
Kepala Lab. Otoda,

Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP

### Lampiran 8. Lembar Revisi Ujian Skripsi

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

#### LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama :Yunira Nur Hidayati

NIM :1111900063

Hari/ Tanggal Ujian : Jumat, 23 Juni 2023

Catatan Perbaikan:

Blank lined area for notes, with a large handwritten mark resembling a stylized 'S' or '7'.

Surabaya, 26 Juni 2023

Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1,

*Dida*  
(Dida Rahmadanik, M.AP)

*Dida*  
(Dida Rahmadanik, M.AP)

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

### LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama :Yunira Nur Hidayati

NIM :1111900063

Hari/ Tanggal Ujian : Jumat, 23 Juni 2023

Catatan Perbaikan:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Surabaya, 27 Juni 2023  
Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan,Revisi dari Dosen Penguji 1,

  
Achduddin Ibnu Rochim

  
Achduddin Ibnu Rochim

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

### LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Yunira Nur Hidayati

NIM : 1111900063

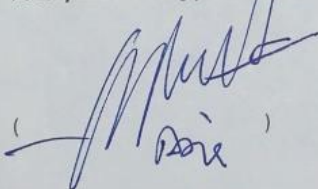
Hari/ Tanggal Ujian : Jumat, 23 Juni 2023

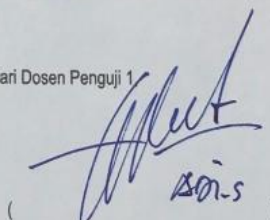
Catatan Perbaikan:

\* Lokasi penelitiannya  
selamatkan! dimana?

Surabaya, 27/6 2023

Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1

()  
Doris

()  
Doris

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

## Lampiran 9. Bukti Publikasi (LoA Publikasi)



COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA  
DEPARTEMEN PENERBITAN

**PRAJA Observer**: JURNAL PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK

e-ISSN: 2797-0469, Jl. Nginden Intan Timur XV. No. 11 Surabaya, Indonesia

<https://www.aksiologi.org/index.php/praja/index>; e-mail: [prajajurnal@gmail.com](mailto:prajajurnal@gmail.com)



**PRAJA Observer**: Jurnal Penelitian Administrasi Publik

1/09/2023/#1011

L.o.A

23/05/2023

Kepada

**YUNIRA NUR HIDAYATI**

[yuniranurh@gmail.com](mailto:yuniranurh@gmail.com);

**DIDA RAHMADANIK**

[didarahma@untag-sby.ac.id](mailto:didarahma@untag-sby.ac.id);

**RACHMAWATI NOVARIA**

[nova@untag-sby.ac.id](mailto:nova@untag-sby.ac.id);

Di

Program Studi Administrasi Publik,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,

**INDONESIA**

Sehubungan dengan naskah artikel ilmiah yang saudara kirimkan ke redaksi jurnal PRAJA Observer, maka dengan ini redaksi informasikan bahwa naskah anda telah diproses untuk publikasi di Jurnal PRAJA Observer. Redaksi sangat mengapresiasi kontribusi naskah anda ke jurnal PRAJA Observer. Dan redaksi telah mengambil keputusan mengenai pengajuan naskah berjudul: **IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 83 TAHUN 2022 TENTANG PEMAKAIAN RUMAH SUSUN**, yang diterbitkan pada bulan September Tahun 2023: Volume 3, No. 05 (2023).

Dengan keputusan redaksi adalah: "DITERIMA"

Hormat kami,

Editor in Chief,

**Kusnan**

PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik

<https://aksiologi.org/index.php/praja/index>



**Lampiran 10. Artikel Publikasi****IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 83  
TAHUN 2022 TENTANG PEMAKAIAN RUMAH SUSUN****Yunira Nur Hidayati**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[yuniranurh@gmail.com](mailto:yuniranurh@gmail.com)

**Dida Rahmadanik**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[didarahma@untag-sby.ac.id](mailto:didarahma@untag-sby.ac.id)

**Rachmawati Novaria**

Program Studi Administrasi Publik,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,  
[nova@untag-sby.ac.id](mailto:nova@untag-sby.ac.id)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pemakaian Rumah Susun di Kota Surabaya. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik dalam pengumpulan data observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber. Penelitian ini berfokus pada peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 pada pasal 2 dimana dikatakan bahwasannya “Setiap penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penduduk Daerah yang belum memiliki rumah tinggal, dapat memanfaatkan rumah susun sebagai tempat hunian sementara merupakan MBR yang terdata dalam data MBR Daerah”. Penelitian yang dilakukan berlandaskan menggunakan teori dari Edward George III tentang Implementasi Kebijakan yang meliputi empat indikator penilaian, yakni komunikasi; sumber daya; disposisi; dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya masih terdapat ketidaksesuaian antara persyaratan pemakaian Rusunawa dengan kondisi dilapangan. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang memengaruhinya. Salah satunya yakni kurangnya klasifikasi persyaratan secara spesifik. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh pihak Dinas ataupun UPTD terkait. Hal tersebut dilakukan agar pada saat implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dapat berjalan dengan sebaik mungkin.

**Kata Kunci** : Kebijakan Publik; Kebijakan Rusunawa; MBR.

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the implementation of the Surabaya Mayor's regulation Number 83 of 2022 concerning the Use of Flats in the City of Surabaya. In this study using a type of qualitative research with techniques in collecting observational data and interviews with several informants. This research focuses on the Mayor of Surabaya regulation Number 83 of 2022 in article 2 where it says that "Every resident of the area as referred to in paragraph (1), namely residents of the area who do not yet have a home, can use flats as temporary shelter, is the MBR recorded in regional MBR data. The research was conducted based on the theory of Edward George III regarding Policy Implementation which includes four assessment indicators,*



*namely communication; resource; disposition; and bureaucratic structure. The results of the study show that there is still a discrepancy between the requirements for using the Rusunawa and the conditions in the field. This is due to several factors that influence it. One of them is the lack of specific classification of requirements. Therefore, it is necessary to carry out regular monitoring and evaluation by the relevant Office or UPTD. This is done so that when implementing the policy it can run in accordance with applicable regulations and can run as well as possible.*

**Keywords :** *Public Policy; Rusunawa Policy; MBR.*

## **A. PENDAHULUAN**

Sebagian besar masyarakat memandang bahwasannya sebuah kota memiliki harapan hidup yang cukup tinggi. Harapan yang tinggi dapat mendorong masyarakat untuk melakukan urbanisasi. Perpindahan penduduk dari wilayah desa ke wilayah kota dalam skala yang cukup besar disebut dengan urbanisasi (Widiawaty, 2019). Urbanisasi juga dapat dikatakan sebagai suatu proses perubahan masyarakat dan kawasan dalam suatu wilayah yang non-urban menjadi urban (Harjoko, 2010). Terjadinya urbanisasi juga didorong oleh faktor – faktor lain yang menjadi daya tarik seperti faktor pendidikan dan faktor pelayanan kesehatan di kota yang lebih memadai, banyaknya lapangan pekerjaan, keamanan kehidupan dan properti yang lebih baik, lingkungan sosial yang lebih baik serta akses jalan dan transportasi yang mudah (Widiawaty, 2019). Masalah yang ditimbulkan karena adanya urbanisasi yakni berkurangnya sumber daya manusia di desa, peningkatan angka kemiskinan dan peningkatan pemukiman kumuh terutama di kota – kota besar (Harahap, 2013).

Kota Surabaya merupakan salah satu dari lima kota besar di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Jumlah penduduk beberapa wilayah pada tahun 2021

Nama Wilayah		Jumlah Penduduk (Jiwa)
Provinsi Jakarta	DKI	10.609.700
Kota Surabaya		2.970.952
Kota Bandung		2.452.900
Kabupaten Sidoarjo		2.082.801
Kota Semarang		1.653.524

Sumber: bps.go.id (telah dikelola penulis)

Kota Surabaya menjadi salah satu wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi kedua setelah Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah penduduk sebanyak 2.970.952 jiwa. Banyaknya jumlah penduduk yang tidak diimbangi oleh besarnya luas wilayah dapat menyebabkan masalah kependudukan seperti meningkatnya laju kepadatan penduduk sehingga persaingan di kota juga lebih ketat (Basyar et al., 2022).

Kepadatan penduduk ini dipengaruhi dengan semakin padatnya jumlah manusia pada suatu batas ruang tertentu dan berbanding terbalik jika dibandingkan dengan seberapa luas wilayahnya (Syaifudin, 2015). Kepadatan penduduk yang cukup tinggi dapat menimbulkan beberapa permasalahan. Adapun permasalahan yang timbul yakni daya tampung pemukiman yang kurang memadai. Berkurangnya lahan pemukiman yang ada di Kota Surabaya menyebabkan harga sewa lahan pemukiman yang semakin mahal sedangkan di Kota Surabaya masih banyak masyarakat yang berstatus MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).

Dilansir dari jawapos.com Sekda Kota Surabaya, Bapak Hendro Gunawan menyampaikan “jumlah MBR terus berkurang dari tahun ke tahun. Pada Desember 2021”. Jumlah masyarakat yang berstatus MBR di Kota Surabaya ini mencapai 1.303.608 jiwa yang masuk di dalam 449.626 kepala keluarga (KK). Setelah beberapa waktu, diketahui bahwa jumlah tersebut mengalami penurunan yang cukup baik pada tahun 2022 ini. Hingga pada Bulan Juli 2022 telah berkurang cukup banyak yakni sebanyak 934.026 jiwa dalam 328.524 KK yang masih masuk didalam data MBR. (jawapos.com)

Untuk dapat menampung jumlah penduduk yang cukup besar dengan luas wilayah yang terbatas, pemerintah membangun Rusunawa sebagai alternatif pemenuhan tempat tinggal agar masyarakat yang berstatus MBR dan tinggal di kota tersebut dapat hidup dengan baik. Keberadaan Rusunawa ini membantu masyarakat yang berstatus MBR mendapatkan tempat tinggal yang layak huni. Rusunawa merupakan rumah susun sederhana sewa yang berbentuk bangunan bertingkat yang dibangun dalam satu lingkungan khusus sebagai tempat hunian yang layak. Hal tersebut juga tercantum dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun pasal 1 ayat 7 yang berbunyi “Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah” (JDIH, 2011).

Meski demikian, masih ditemukan beberapa penghuni yang berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara) dan non MBR. Pada bulan Februari tahun 2022 lalu, diilansir dari *liputan6.com* dijelaskan bahwasannya “Dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, rusunawa Surabaya Malah dihuni ASN dan orang berada”. Dalam berita tersebut menjelaskan bahwasannya “Pemerintah Kota Surabaya mengakui ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tinggal di Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa). Padahal semestinya Rusunawa tersebut digunakan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).” Irvan Wahyudradjad selaku Kepala DPRKPP (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan) Kota Surabaya juga mengatakan “Hasilnya, memang ada beberapa penyimpangan soal penghuni rusun itu.” (*liputan6.com*)

Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan kebijakan yang mengatur tentang pemakaian Rumah susun yang ada di Kota Surabaya dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022. Perwali ini menjelaskan bahwasannya “Rumah susun merupakan bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing- masing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dimiliki atau dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya”. Pada pasal 2 ayat 2 juga dijelaskan syarat penghuni yang dapat menempati Rusunawa yang berbunyi “Setiap penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan MBR yang terdata dalam data MBR Daerah” Perwali tersebut diterbitkan pada 26 Agustus 2022. (Surabaya, 2022).

Dalam Peraturan Walikota Surabaya tersebut, juga menjelaskan bahwasannya kebijakan penggunaan Rusunawa ini memiliki beberapa persyaratan penting seperti “penduduk yang boleh menempati Rusunawa merupakan penduduk Daerah yang belum memiliki rumah tinggal, dapat memanfaatkan rumah susun sebagai tempat hunian sementara dan telah menjadi penduduk Surabaya minimal 5 tahun dengan menunjukkan surat keterangan RT/RW dan kelurahan setempat; menunjukkan slip gaji dari tempat kerja; serta tidak memiliki anggota keluarga yang berprofesi sebagai ASN, TNI, dan Polri dalam satu KK. Kebijakan tersebut dapat menjadi dasar hukum dan pedoman pejabat publik terkait untuk melakukan pengelolaan Rusunawa agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.” (Surabaya, 2022)

Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan rendah ini diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 pada pasal 1 ayat 20 dijelaskan bahwasannya “Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat berpenghasilan rendah dengan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan dibawah garis kemiskinan” (JDIH, 2019). Warga yang berstatus MBR tersebut merupakan warga yang berada digaris kemiskinan. Pengeluaran konsumsi per kapita sebulan merupakan seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh satu keluarga untuk biaya konsumsi anggota keluarga dalam bentuk pemberian dan pembelian yang kemudian dibagi dengan jumlah anggota keluarga yang tinggal dalam satu atap rumah (bps.go.id).

Penentuan status MBR bagi masyarakat Kota Surabaya ini terdiri atas beberapa indikator pertimbangan yakni sebagai berikut :

- a) Penghasilan perkapita bulanan +/- Rp. 1.500.000,-;
- b) Salah satu anggota keluarga merupakan penyandang disabilitas / lansia;
- c) Dilihat berdasarkan aset yang dimiliki;
- d) Kondisi rumah yang ditinggali.

*(wawancara dengan Ibu Anisa selaku salah satu pegawai Dinas Sosial Kota Surabaya pada 14 April 2023)*

Penentuan kategori MBR dan kategori warga miskin ini cukup berbeda. Peningkatan MBR dilakukan dengan menggunakan perhitungan proxy means test berdasarkan perhitungan perkiraan konsumsi suatu

keluarga. Dimana hasil pemeringkatan tersebut nantinya akan di kelompokkan sesuai dengan hasil pemeringkatannya. Hasil dari pemeringkatan tersebut nantinya yang masuk dalam data desil 1,2,3,dan 4 akan masuk dalam database MBR.(Organisasi et al., 2023)

Dengan melihat latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pemakaian Rumah Susun”.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut Edward George III, “implementasi diartikan sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada di antara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan (*output, outcome*). Aktivitas implementasi menurutnya terdiri atas perencanaan, pendanaan, pengorganisasian, pengangkatan dan pemecatan karyawan, negosiasi, dan lain-lain”.

Edward mengatakan bahwasannya penilaian implementasi kebijakan dapat dinilai dari indikator pendukungnya. Menurut Edward, implementasi kebijakan terdiri dari empat indikator yaitu (1) komunikasi; (2) sumber daya; (3) disposisi atau sikap pelaksana; (4) dan struktur birokrasi.

### **a. Komunikasi**

Komunikasi memiliki peran yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Keberhasilan penyampaian komunikasi menurut Edward dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sebagai berikut:

- 1) Transmisi : Penyampaian kebijakan kepada para pelaksana kebijakan terkait.
- 2) Kejelasan (*Clarity*) : Adanya kejelasan terkait tujuan dan tata cara pengimplementasian suatu kebijakan.
- 3) Konsistensi : proses implementasi dapat dikatakan efektif apabila konsistensi komunikasi yang diciptakan antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat (publik) baik.

### **b. Sumber Daya**

Sumber daya merupakan sesuatu yang dapat menunjang implemementasi suatu kebijakan. Sumber daya memiliki pengaruh yang

cukup kuat terhadap efektivitas implementasi suatu kebijakan (Anggara, 2018). Sumber daya menurut Edward meliputi tiga hal yakni : Staf; Informasi; Kewenangan; dan Fasilitas.

**c. Disposisi**

Disposisi sendiri dapat diartikan sebagai sikap yang direalisasikan oleh para pelaksana kebijakan. Pada indikator disposisi ini dipengaruhi oleh tiga unsur yakni kognisi; arahan dan tanggapan pelaksana; serta tanggapan pelaksana. Dengan kata lain apabila suatu kebijakan ingin implementasinya berjalan dengan baik, maka pelaksana kebijakan juga harus mengetahui sekaligus mampu melaksanakan kebijakan dengan sebaik mungkin. Kemampuan para pelaksana kebijakan dapat menjadi penilaian penting dalam proses implementasi kebijakan (Anggara, 2018).

**d. Struktur Birokrasi**

Indikator struktur birokrasi ini memiliki dua aspek penilaian yakni mekanisme implementasi dan struktur birokrasi. Mekanisme implementasi meliputi bagaimana tindakan implementator dengan berpedoman pada SOP (Standart Operasional Procedur) yang berlaku. Sedangkan struktur birokrasi berfungsi sebagai pengawasan terhadap kebijakan yang berlaku. Dengan struktur birokrasi yang rumit dapat melemahkan sistem pengawasan kebijakan. Berbeda dengan struktur birokrasi yang tersusun secara sederhana. Jika struktur yang ada lebih sederhana maka dapat mempermudah pengawasan implementasi suatu kebijakan (Anggara, 2018)

**C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang di dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau kenyataan sosial yang terjadi di lapangan. Boogdan dan Taylor mendefinisikan “metodologi kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata istilah tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati” (Moleong, 2018). Objek penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pemakaian Rumah Susun pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “Setiap penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penduduk Daerah yang belum memiliki rumah tinggal, dapat memanfaatkan rumah susun sebagai tempat hunian sementara merupakan MBR yang terdata dalam data MBR Daerah”. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi

kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Teori ini memiliki empat indikator penilaian yakni Komunikasi; Sumber Daya; Disposisi; dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini dilakukan di Rusunawa Keputih Kota Surabaya. Data penelitian ini bersumber dari data Primer dan Sekunder. Dimana data primer berasal dari hasil wawancara dengan kepala UPTD Rusunawa, Staff pelaksana teknis lapangan, dan juga beberapa masyarakat yang menghuni Rusunawa Keputih. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen dari Dinas terkait dan beberapa artikel penelitian terdahulu. Dalam proses penelitian, peneliti juga mendokumentasikan setiap kegiatan penelitian dalam bentuk foto. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman melalui tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data yang didapatkan. Reduksi merupakan proses pemilihan data yang diperlukan dalam proses penelitian yang kemudian data tersebut diolah dan disajikan dalam pembahasan penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 ini mulai ditetapkan pada 26 Agustus 2022 lalu. Perwali ini mengatur tentang Pelayanan Pemakaian Rumah Susun. Didalam perwali juga dijelaskan mulai dari persyaratan pemakaian rumah susun, tata cara pengajuan permohonan izin, sistem pengawasan, sanksi Administratif bagi penghuni Rusunawa mulai dari peringatan tertulis hingga pemutusan perjanjian sewa menyewa Rusunawa. Sanksi yang didapatkan tergantung seberapa berat pelanggaran yang dilakukan penghuni tersebut. Penelitian ini dilakukan pada Rusunawa Keputih yang terletak di wilayah Kelurahan Keputih Surabaya Timur. Rusunawa keputih ini terdiri dari 4 blok yakni blok A; blok B; blok C; dan Blok D. Setiap blok terdiri dari 5 lantai dimana setiap blok memiliki jumlah unit yang berbeda - beda. Adapun jumlah unit yang ada di Rusunawa Keputih ini yakni Blok A terdiri dari 60 Unit; blok B 70 Unit; blok C 75 Unit; sedangkan Blok D 65 Unit.

Pada penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan yang mengatur tentang syarat – syarat penghuni Rusunawa yang berpedoman pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 dengan berfokus pada syarat utama penghuni Rusunawa yakni berstatus MBR dan terdata pada MBR daerah. Seluruh data yang didapatkan dari hasil penelitian ini diuraikan berdasarkan teori implementasi yang disampaikan oleh Edward George III sebagai berikut :

##### **1. Komunikasi**

Indikator komunikasi menurut Edward George III terdiri atas tiga komponen penyusunnya yang terdiri dari transmisi (transformasi informasi), kejelasan, dan dan konsistensi informasi. Sebuah kebijakan

yang akan diimplementasikan harus disalurkan dan ditransformasikan dengan baik kepada pejabat yang akan melaksanakannya. Kejelasan tujuan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.. Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten. Apabila perintah yang diberikan tidak konsisten, maka dapat membingungkan para pelaksana dalam proses implementasi kebijakan (Anggara, 2018). Ketiga komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain dan membutuhkan kerjasama yang seimbang sehingga suatu kebijakan dapat dikomunikasikan dengan baik.

Kebijakan yang akan diimplementasi harus sudah disampaikan kepada jajaran pemerintah terkait. Mengenai komunikasi kebijakan yang dimuat dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 dapat dikatakan konsistensi komunikasinya cukup baik. Informasi yang diberikan oleh kepala UPTD kepada Pelaksana teknis lapangan juga memiliki transformasi yang baik. Pelaksana teknis lapangan sebagai pengelola juga menyampaikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan arahan dari kepala UPTD. Penyampaian informasi ini dilakukan melalui sosialisasi kepada penghuni Rusunawa dan pemberian surat edaran kepada penghuni Rusunawa yang berstatus non MBR. Konsistensi informasi diantara para penghuni Rusunawa juga menjadi penilaian penting dalam indikator komunikasi. Adanya informasi terkait penghuni Rusunawa yang berstatus non MBR juga disampaikan oleh penghuni Rusunawa saat peneliti melakukan wawancara. Hal tersebut membuktikan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh kepala UPTD dengan penghuni Rusunawa saling berkaitan. Kedua belah pihak setuju dengan pernyataan adanya masyarakat non MBR yang masih tinggal di Rusunawa Keputih.

## **2. Sumber Daya**

Sumber daya merupakan sesuatu yang dapat menunjang implemetansi suatu kebijakan. Sumber daya memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap efektivitas implementasi suatu kebijakan (Anggara, 2018) Indikator sumber daya ini meliputi penilaian kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) staf dan pemeliharaan fasilitas rusunawa. Apabila sumber-sumber daya tersebut kurang memadai, maka akan berdampak pada tidak efektifnya pelaksanaan kebijakan rumah susun sederhana sewa (Ikhwansyah et al., 2023).

Indikator sumber daya ini meliputi penilaian kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) staf dan pemeliharaan fasilitas rusunawa. Fasilitas yang dimiliki Rusunawa Keputih merupakan sarana dan prasarana pendukung yang berfungsi untuk membantu proses implementasi kebijakan. Tanpa kelengkapan fasilitas yang memadai, implementasi juga tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Fasilitas yang dimaksud diatas merupakan fasilitas beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan proses implementasi kebijakan (Anggara, 2018).



Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwasannya SDM staf pelaksana teknis lapangan dapat dinilai cukup memiliki peran penting. beberapa penghuni juga mengakui bahwasannya staff terkait selalu melakukan tugasnya sesuai fungsinya dan juga melakukan pengecekan serta pemeliharaan fasilitas yang dimiliki Rusunawa Keputih. Selain itu, Dengan dilakukannya pengecekan atau sidak setiap bulannya, dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan penghuni untuk menempati Rusunawa. Apabila penghuni mengetahui adanya warga yang berstatus non MBR juga dapat menyampaikan secara langsung kepada Dinas melalui pengelola Rusunawa Keputih.

### **3. Disposisi**

Disposisi sendiri dapat diartikan sebagai sikap yang direalisasikan oleh para pelaksana kebijakan. Pada indikator disposisi ini dipengaruhi oleh tiga unsur yakni kognisi; arahan dan tanggapan pelaksana; serta tanggapan pelaksana. Dengan kata lain apabila suatu kebijakan ingin implementasinya berjalan dengan baik, maka pelaksana kebijakan juga harus mengetahui sekaligus mampu melaksanakan kebijakan dengan sebaik mungkin. Kemampuan para pelaksana kebijakan dapat menjadi penilaian penting dalam proses implementasi kebijakan (Anggara, 2018). Kemampuan pelaksana kebijakan dalam menganalisis permasalahan dan dinamika yang terjadi dilapangan sangat diperlukan. Hal tersebut diperlukan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan agar semakin baik (Ikhwansyah et al., 2023).

Pada penelitian ini, diketahui bahwasannya para pelaksana kebijakan telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang disampaikan dinas terkait melalui Surat Perjanjian Kerja (SPK). Akan tetapi, diketahui bahwasannya dalam proses implementasinya belum berjalan cukup baik. Para pelaksana kebijakan sudah berupaya untuk memberikan pengertian dan himbauan kepada penghuni yang berstatus non MBR. Para penghuni menyampaikan bahwa mereka masih memerlukan waktu untuk bisa pindah dari Rusunawa Keputih. Hal tersebut juga telah disampaikan oleh petugas teknis lapangan kepada pihak UPTD Rusunawa yang kemudian pihak UPTD terkait memberikan keringanan berupa jangka waktu yakni maksimal satu tahun sejak penerapan Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2022 tersebut.

### **4. Struktur Birokrasi**

Indikator struktur birokrasi ini memiliki dua aspek penilaian yakni mekanisme implementasi dan struktur birokrasi. Mekanisme implementasi meliputi bagaimana tindakan implementator dengan berpedoman pada SOP (Standart Operasional Procedur) yang berlaku. Sedangkan struktur birokrasi berfungsi sebagai pengawasan terhadap kebijakan yang berlaku. Dengan struktur birokrasi yang rumit dapat melemahkan sistem pengawasan kebijakan. Berbeda dengan struktur birokrasi yang tersusun

secara sederhana. Jika struktur yang ada lebih sederhana maka dapat mempermudah pengawasan implementasi suatu kebijakan (Anggara, 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dapat diketahui bahwasannya struktur birokrasi sangat memengaruhi penyampaian kebijakan dan sistem evaluasi. Pemantauan dari UPTD terhadap staff memiliki peran penting dalam penerapan kebijakan tersebut. Meski demikian, diharapkan selalu dilakukan pemantauan terhadap staff maupun para penghuni secara berkala agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasannya kebijakan Rusunawa yang diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 ini sudah diimplementasikan dengan cukup baik. Akan tetapi masih perlu dilakukan pemantauan, evaluasi serta pengkajian ulang terkait diberlakukannya kebijakan tersebut. Hal tersebut dikarenakan masih ditemukan penghuni yang berstatus non MBR yang menempati Rusunawa Keputih yang mana pada dasarnya hanya masyarakat yang masuk dalam data MBR daerah saja yang dapat menempati Rusunawa tersebut. Implementasi kebijakan dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dapat dikatakan cukup sebagaimana yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya. Dari segi komunikasi, implementasi kebijakan dapat dikatakan baik karena kebijakan ini telah disampaikan oleh pihak UPTD kepada penghuni Rusunawa pada Bulan Oktober 2022 lalu. Dan penghuni Rusunawa juga telah menerima informasi tersebut. Dari segi SDM dan sarana prasarana dapat dikatakan baik pula. Hal tersebut dikarenakan pelaksana teknis lapangan selalu ada di lapangan dan memantau sehingga ketika terdapat kerusakan fasilitas dapat segera dibenahi oleh petugas terkait. Staff terkait juga mampu melaksanakan tugasnya sesuai disposisi yang diberikan oleh UPTD berupa Surat Perjanjian Kerja. Tuga dan fungsi para pelaksana kebijakan juga telah disampaikan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 8 tahun 2023.

Sedangkan dari segi kepatuhan masyarakat, masih ditemukan kekurangan. Terutama bagi penghuni Rusunawa yang berstatus non MBR. Mereka masih berharap bisa tinggal di Rusunawa dikarenakan mereka juga tidak memiliki rumah lain di Kota Surabaya. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi UPTD dan Dinas terkait agar kebijakan yang ada dapat diimplementasikan dengan sebaik – baiknya sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan tersebut.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Basyar, M. R., Puspaningtyas, A., & Bella, V. S. (2022). *Evaluation of the village development index as an effort to provide the right policy intervention*. 4(2), 209–218. <https://doi.org/10.33474/jisop.v4i2.18826>
- Dr. Sahya Anggara, M. S. (2018). *Pengantar Kebijakan Publik*.
- Harahap, F. R. (2013). Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota Di Indonesia. *Society*, 1(1), 35–45. <https://doi.org/10.33019/society.v1i1.40>
- JDIH. (2011). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39256/uu-no-20-tahun-2011>
- Liputan6. (2022). *Dikhususkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Rusunawa Surabaya Malah Dihuni ASN dan Orang Berada*. <https://www.liputan6.com/jatim/read/4880626/dikhususkan-untuk-masyarakat-berpenghasilan-rendah-rusunawa-surabaya-malah-dihuni-asn-dan-orang-berada>. Diakses pada tanggal 14 September 2022.
- M. Sholahudin. (2022). *Jadi Tanda Tanya, MBR di Surabaya Setara 32 Persen Jumlah Penduduk*. <https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01403980/jadi-tanda-tanya-mbr-di-surabaya-setara-32-persen-jumlah-penduduk>. diakses pada tanggal 17 Oktober 2022.
- Surabaya, P. D. K. (2022). *Walikota Surabaya Provinsi Jawa Timur*. 1–13. [https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/PERDA\\_59.pdf](https://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/PERDA_59.pdf)
- Syaifudin. (2015). No Title? \_\_. *Ekp*, 13(3), 1576–1580.
- Widiawaty, M. A. (2019). Faktor-Faktor Urbanisasi di Indonesia. *Pendidikan Geografi UPI*, 1–10.

## Lampiran 11. Hasil Turnitin Artikel Publikasi

Artikel yunira			
ORIGINALITY REPORT			
<b>19%</b>	<b>19%</b>	<b>7%</b>	<b>9%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
<b>1</b>	<b>www.aksiologi.org</b> Internet Source		<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>ejournal.undip.ac.id</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>es.scribd.com</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>jatim.liputan6.com</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>core.ac.uk</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>Submitted to Universitas Maritim Raja Ali Haji</b> Student Paper		<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>Submitted to Universitas Merdeka Malang</b> Student Paper		<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>bappedalitbang.surabaya.go.id</b> Internet Source		<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>id.123dok.com</b> Internet Source		<b>&lt;1%</b>

10	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
11	eprints.ubhara.ac.id Internet Source	<1 %
12	jdih.surabaya.go.id Internet Source	<1 %
13	paj.upnjatim.ac.id Internet Source	<1 %
14	www.jawapos.com Internet Source	<1 %
15	ejurnal.politeknikpratama.ac.id Internet Source	<1 %
16	karya.brin.go.id Internet Source	<1 %
17	konsultan-perizinan.com Internet Source	<1 %
18	library.binus.ac.id Internet Source	<1 %
19	lokeryu.com Internet Source	<1 %
20	repository.unibos.ac.id Internet Source	<1 %
21	repository.unismabekasi.ac.id Internet Source	<1 %

22	<a href="http://jmiap.ppj.unp.ac.id">jmiap.ppj.unp.ac.id</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://digilib.ui.ac.id">digilib.ui.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://ejournal.iaida.ac.id">ejournal.iaida.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://mafiadoc.com">mafiadoc.com</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://www.neliti.com">www.neliti.com</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://arigusnita.blogspot.com">arigusnita.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id">jurnalmahasiswa.unesa.ac.id</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://mulok.library.um.ac.id">mulok.library.um.ac.id</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://repository.umsu.ac.id">repository.umsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://www.travelio.com">www.travelio.com</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1 %

34	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
35	dspace.umkt.ac.id Internet Source	<1 %
36	journal.ipb.ac.id Internet Source	<1 %
37	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
38	ejournal.alkhoziny.ac.id Internet Source	<1 %
39	ejournal.stiekie.ac.id Internet Source	<1 %
40	qdoc.tips Internet Source	<1 %
41	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
42	repository.universitasbumigora.ac.id Internet Source	<1 %
43	sakip.tanahbumbukab.go.id Internet Source	<1 %
44	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
45	zh.scribd.com	

Internet Source	<1 %
<b>46</b> <a href="http://ejournal.fisip.unjani.ac.id">ejournal.fisip.unjani.ac.id</a> Internet Source	<1 %
<b>47</b> <a href="http://peraturan.bpk.go.id">peraturan.bpk.go.id</a> Internet Source	<1 %
<b>48</b> <a href="http://repository.upstegal.ac.id">repository.upstegal.ac.id</a> Internet Source	<1 %
<b>49</b> <a href="http://repository.unib.ac.id">repository.unib.ac.id</a> Internet Source	<1 %
<b>50</b> <a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	<1 %

Exclude quotes  On

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  On